

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### VI.1 Kesimpulan

Dalam memahami tujuan dan nilai yang memotivasi keputusan dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri, ideologi dan identitas merupakan faktor non-material yang dapat digunakan untuk mengartikan motivasi dari seorang pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan dapat menggunakan ideologi sebagai sebuah *economizing devices* untuk membuat penilaian yang efisien dan efektif dengan mengikuti serangkaian prinsip pedoman berperilaku politik yang mereka yakini. Melalui kerangka konstruktivisme, dapat dibuktikan bahwa ideologi dan identitas yang dimiliki seorang MEP memotivasi kebijakan yang ia tawarkan dalam menyusun objektif dan strategi keamanan serta perdagangan dalam proposal maupun sidang pleno PE mengenai strategi UE di Indo-Pasifik. Dalam kasus tiga kelompok politik sentris di PE yakni EPP, S&D, dan *Renew Europe*, masing-masing memiliki ideologi yang menjadi visi daripada kebijakan dan misi politik mereka yakni konservatisme, sosialisme dan liberalisme. Namun meskipun memiliki perbedaan ideologi mereka tetap memiliki posisi atau identitas politik yang seragam dan mereka yakini untuk dapat menutup perpecahan ideologi di UE yakni identitas sentrisme.

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ideologi yang dimiliki oleh masing-masing kelompok politik di PE dengan identitas sentrisme berperan sebagai sebuah faktor non-materi, membentuk dan bertindak memberikan *influence* bagi MEP dalam proses pengambilan kebijakan rekomendasi strategi UE di Indo-Pasifik. Identitas politik sentrisme yang saat ini mendominasi komposisi dari PE mencerminkan bagaimana politik sentris populer di kalangan masyarakat Eropa. Oleh karena itu melalui penelitian ini ditemukan bahwa proposal yang mencerminkan sintesis antara ideologi liberalism dan sosialisme akan cenderung mudah untuk diterima dan diadopsi oleh PE. Hal ini juga mengingat komposisi kursi kelompok sentrisme yang secara tidak langsung memengaruhi hasil voting dari proposal, sehingga proposal seperti *The EU Security Challenges in Indo-Pacific* dan *Indo-Pacific Strategy in The Area of Trade and Investment* dapat diterima dengan mudah di PE untuk kemudian diserahkan kepada Komisi dan

Dewan Eropa. Dominasi identitas sentrisme di PE juga memberikan dampak proposal dan rekomendasi kebijakan eksternal UE di Indo-Pasifik memiliki identitas sentrisme dan menyintesis ideologi konservatisme, sosialisme, dan liberalisme.

Namun meskipun PE memiliki wewenang yang besar dalam memberikan tekanan berupa rekomendasi maupun usulan terhadap kebijakan luar negeri UE, proses formulasi kebijakan luar negeri UE tidak berhenti di PE tetapi masih ada lembaga UE lainnya dan juga kesepakatan antar negara anggota yang perlu dipertimbangkan. Seperti Komisi Eropa dan Dewan Eropa. Tetapi, ideologi dan identitas masing-masing kelompok politik di PE berkontribusi untuk mengukur ideologi dan identitas politik yang populer di masyarakat Eropa hingga memberikan nuansa dan memberikan perbedaan dalam model kebijakan luar negeri UE.

## VI.2 Saran

Setelah menggali lebih jauh mengenai fungsi dari ideologi dan identitas melalui kerangka konstruktivisme dalam mengidentifikasi motivasi dan dorongan yang dimiliki MEP di PE dalam menentukan peran UE di Indo-Pasifik, maka peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Saat ini dalam studi ilmu HI, masih jarang sekali penelitian yang menggali lebih jauh fungsi daripada ideologi dan identitas yang dimiliki oleh *pressure group* maupun pembuat kebijakan, khususnya dalam paradigma konstruktivisme yang mana kedua hal tersebut merupakan faktor non-materi yang bekerja dalam hubungan internasional.

Selain itu, dalam mengkaji asal usul daripada motivasi seorang pembuat kebijakan, perlu dikali lebih lanjut terkait interkonektivitas antara perilaku politik dan *reasoning* dalam analisis kebijakan luar negeri. Pendekatan lain dalam ilmu politik yang jarang digunakan seperti pendekatan sains kognisi atau *cognitive science* dan identitas aktor HI dalam kerangka konstruktivisme juga akan menjadi subjek penelitian yang memperkaya khasanah keilmuan HI.

Bagi pemerintah di sektor publik, khususnya Kementerian dan Lembaga Luar Negeri negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, peneliti memiliki saran bahwa setiap negara di Indo-Pasifik perlu memahami betul tujuan dan maksud UE

meningkatkan perannya di Indo-Pasifik. Hal ini termasuk menggali lebih jauh motivasi politik dan spektrum politik yang sedang mendominasi struktur kelembagaan UE, termasuk ideologi dan identitas politik di masyarakat Eropa. Perlu juga adanya penelitian mengenai pengaruh ideologi dan identitas politik nasional terhadap kinerja menteri-menteri negara anggota UE dalam Dewan Eropa. Perlu digaris bawahi pula bahwa sebagian besar negara di Indo-Pasifik merupakan negara bekas jajahan negara anggota UE, sehingga negara-negara di Indo-Pasifik harus senantiasa mendorong dan menjunjung tinggi kerja sama berbasis hukum dan kesetaraan dengan memahami motivasi ideologis dari UE.